BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan Ekonomi Nasional di Indonesia, yang menjadi prioritas yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dan pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Pemberdayaan UMKM di tengah arus *globalisasi* dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan *global*, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran.

Melalui kerjasama antar negara *ASEAN* indonesia termasuk dalam anggota Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) diberlakuakan pada 31 Desember 2015. MEA adalah bentuk integrasi ekonomi *Association of South East Asia Nations (ASEAN)* dalam artian adanya system perdagaangan bebas antara Negara-negara *ASEAN* melalui UU Nomor 7 tahun 2014 mengenai perdagangan.

Indonesia dan sembilan diantaramya Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam adalah negara anggota *ASEAN* yang telah menyepakati perjanjian MEA atau *ASEAN* sehingga MEA diharapkan dapat mewujudkan tercapainya suatu kawasan yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi mengembangkan

kerjasama regional *ASEAN* dibidang ekonomi yang merupakan realisasi dari integrasi ekonomi yang termuat dalam visi *ASEAN* 2020. Untuk membantu tercapainya integrasi ekonomi MEA, maka dibuatlah MEA *Blueprint*. MEA *Blueprint* memuat empat pilar utama yaitu:

1. *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas.
2. *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce.*
3. *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi *ASEAN* untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam.
4. *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian *global* dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi *global*.

Keempat pilar MEA tersebut saling berhubungan untuk mewujudkan integrasi ekonomi *ASEAN*. Melalui Kementrian Koperasi dan UKM yang berperan aktif karena pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari pemberdayaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menghadapi persaingan MEA.

Bagi Indonesia UMKM berkontribusi sangat besar untuk penyerapan tenaga kerja maupun pendapatan nasional. Perkembangan UMKM yang sangat signifikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan perekonomian Indonesia serta mengurangi angka pengangguran dengan adanya lapangan kerja baru peran UMKM disini sangatlah pentinn. Dimana pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat melalui keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan dan memberdayakan UMKM telah diatur jelas dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas prinsip, tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi pemberdayaan, sangsi administratif, dan ketentuan pidana.

Tercapainya kesejahteraan masyarakat dimana peran pemerintah melalaui UUD No 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 7 ayat 1 (satu) menyebutkan bahwa pemerintah daerah dipersilahkan untuk membuat sebuah kebijakan atau peraturan perundang-undangan sesuai aspek yang dijelaskan pada pasal 7 tersebut sesuai iklim usaha di daerah. Selain amanat dari undang-undang No 20 Tahun 2008, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam hal pembagian urusan pemerintahan merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib kewenangan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota (Pasal 11 dan 12). Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota didasarkan atas prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalistis, serta kepentingan strategis nasional (Pasal 9 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 1).

Peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara, Kota Bandung merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional mulai dari sektor, Industri, Jasa dan Pariwisata. Dimana jumlah UMKM di Kota Bandung memiliki jumlah yang cukup sangat tinggi. Dimana masyarakat Kota Bandung terkenal kreatif, sehingga kota bandung menjadi pelopor UMKM yang kreatif . Dengan sebuah potensi masyarakat yang cukup kreatif, Kota Bandung menjadi sebuah panutan bagi kota lainnya dalam mengembangkan dan memajukan potensi UMKM yang dimiliki pada setiap kota di Indonesia.

Industri dan jasa bagi daerah sekitarnya, juga komitmen dalam memajukan dan mengembangkan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai penggerak UMKM di Indonesia yang sukses sehingga Kota Bandung sebagai pelopor bagi Kota lainnya dalam memberdayakan, mengembangkan, dan memajukan potensi UMKM yang dimiliknya.

Pemberdayaan UMKM yang berada di Kota Bandung diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bandung No 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peraturan daerah ini memuat tentang ketentuan umum, asas, tujuan, arah kebijakan, tugas wewenang pemerintah daerah, kriteria, perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, kemitraan, hak dan kewajiban masyarakat, peran dunia usaha, insentif, larangan, sanksi asministrasi, dan ketentuan pidana, Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2013-2018, Pemerintah Kota Bandung merancang peningkatan ekonomi melalui sentra-sentra UMKM potensial yang berada di wilayah Kota Bandung.

UMKM yang memiliki potensi unggulan dan ciri khas dari Kota Bandung yang kini menjadi fokus pengembangan Pemerintah Kota Bandung serta dalam rangka bersaing ditingkat *global* melalui kerjasama antar negara anggota MEA, yaitu sentra industri rajutan binong Jati, sentra perdagangan *jeans* Cihampelas, sentra industri dan perdagangan sepatu Cibaduyut, sentra industri kaos Suci, sentra industri Boneka Sukamulya merupakan 7 sentra menghasilkan produk unggukan Kota Bandung.

Diantara sentra tersebut, satu diantaranya Sentra Industri Boneka Sukamulya yang menjadi lokus peneliti dalam penulisan penelitian ini. Bisnis UMKM Boneka menjadi salah satu pendorong tumbuhnya ekonomi diberbagai daerah di Indonesia. Kota Bandung dapat dikatakan menjadi pelopor para pelaku UMKM dan Industri kreatif di Indonesia. Memang bisa diakui bahwa pelaku bisnis UMKM Kota Bandung dapat menginspirasi berbagai orang dengan kreatifitas yang dihasilkannya. Beberapa hal yang menarik di Kota Bandung adalah trend kerajinan, khususnya Boneka.

Berbagai macam Boneka yang bervariatif dan terus mengikuti perkembangan jaman bisa selalu muncul dari kreatifitas para pelaku UMKM Sentra Boneka di Kota Bandung. Dengan tumbuhnya iklim usaha yang baik maka akan mendorong pada perbaikan ekonomi dimana akan berdampak luas pada masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan. Para pelaku UMKM Boneka harus mampu menghadapi semua tantangan menghadapi MEA.

Sentra Boneka di Sukamulya adalah salah satu UMKM unggulan yang ada di Kota Bandung terletak di Jl. Sukamulya Indah No.18 RT 01/02 Bandung. Sejalan dengan Perkembangan sentra Boneka di sukamulya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung saat ini telah diberlakukan Program Standar Nasional

Indonesia (SNI) untuk produksi Boneka pada tahun 2015. SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku nasional di seluruh Indonesia yang dirumuskan oleh panitia teknis yang berada di masing-masing institusi teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan kegiatan standardisasi di Indonesia. Standar merupakan sebuah inovasi yang penting bagi UMKM sentra Boneka sukamulya karena memberikan dampak yang luas untuk menghadapi MEA.

Standar diterbitkan untuk memastikan barang dan jasa agar dapat diproduksi dan digunakan pada negara yang berbeda. Standar juga digunakan untuk mengurangi hambatan perdagangan barang dan jasa sehingga dapat diperdagangkan dengan bebas di seluruh dunia. Dengan adanya SNI membantu memastikan sentra Boneka mendapatkan hasil terbaik dengan menghasilkan produk berkualitas dalam menghadapi MEA. Dampak standar akan semakin terlihat bila diikuti dengan pembentukan pasar atau market baru, artinya bagi pengrajin UMKM Boneka Sukamulya adalah mereka selain dapat memenuhi permintaan pasar dalam negeri, juga mampu menghadapi persaingan MEA. Terhitung sejak Oktober 2013 lalu, di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 dengan revisi melalui Peraturan Menteri No.55/M-IND/PER/11/2013 tentang pemberlakuan SNI mainan anak secara wajib pemberlakuan SNI wajib upaya pemerintah meningkatkan kualitas produksi bisa bersaing dengan luar negeri dalam menghadapi persaingan MEA.

Melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung saat ini telah diberlakukan Program SNI, Program Penerapan SNI Boneka hal ini termasuk dengan

kebijakan edukasi pada penerapan SNI yang tergolong pada Industri UMKM seperti pengrajin Boneka Sukamulya di tengah banyaknya impor Boneka karena MEA.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Program Penerapan SNI oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Bidang Sumber Daya dan Promosi Industri untuk mengikuti pembinaan penerapan pada SNI untuk Industri UMKM seperti pengrajin Boneka Sukamulya untuk menghadapi persaingan MEA. Pembinaan penerapan SNI pengrajin Boneka dibutuhkan komitmen dan motivasi yang kuat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan pengrajin Boneka Sukamulya untuk meningkatkan kinerja sehingga produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan diterima oleh pasar nasional maupun pasar *global.* Karena Boneka merupakan salah satu sasaran utama produksi *global*

Menghadapi MEA, persaingan terkait mutu dan keamanan produk yang dihasilkan sangat penting dan menentukan kelangsungan usaha. Bagi pengrajin Boneka, peluang dalam menghadapi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan dan mencapai kinerja maksimal dalam menghasilkan produk-produk boneka yang berkualitas dan aman, kinerja tersebut salah satunya terkait pada peningkatan jumlah produksi Boneka sesuai dengan permintaan pasar dan pemenuhan standar yang menjamin kekuatan fisik Boneka serta keamanan zat kimia yang terkandung dalam bahan-bahan pembuatnya sehingga bisa diterima di pasal nasional hingga pasal *global.*

Permasalahan Program SNI untuk menghadapi persaingan MEA yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Bidang Sumber Daya dan Promosi Industriyang di terapkan pada tahun 2015 sampai 2016 masalah

yang pertama adalah Pemberdayaan Program SNI belum optimal untuk memungkinkan potensi UMKM Sentra Boneka Sukamulya menciptakan suasana lingkungan usaha yang nyaman, kondusif dan strategis sehingga mampu menghadapi MEA karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum mendukung dan membiarkan UMKM Sentra Boneka Sukamulya semakin terpuruknya dari tahun 2012 yang awalnya terdapat 12 pengusaha dan di tahun 2017 hanya terdapat 4 pengusaha.

Pemberdayaan Program SNI oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sudah memperkuat pengetahuan dan kemampuan UMKM Sentra Boneka Sukamulya tentang Program SNI agar mampu menghadapi persaingan MEA melalui sosialisai pada tahun 2015 tetapi masi terkendala partisipasi UMKM Sentra Boneka Sukamulya yang hanya satu sentra yang mengikuti Program SNI.

Pemberdayaan Program SNI belum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tidak memiliki regulasi melindungi keberadaan UMKM Sentra Boneka Sukamulya untuk melindungi produk yang sudah dihasilkan agar mampu menghadapi persaingan MEA karena harus mengikuti Program SNI tersebut dan masi terkendala oleh mahalnya persyaratan harus mempunyai SIUP dan membayar lima juta rupiah hanya berlaku 6 bulan setelah itu harus di perpanjang lagi maka memberatkan UMKM Sentra Boneka Sukamulya.

Pemberdayaan Program SNI oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk memberikan bimbingan dan dukungan UMKM Sentra Boneka Sukamulya sehingga berkembang dan produk bisa bersaing menghadapi persaingan MEA adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tidak ada bantuan

alat dan regulasi modal berupa bantuan kepada UMKM Sentra Boneka Sukamulya untuk mengikuti Program SNI.

Pemberdayaan Program SNI oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk memelihara kondisi yang kondusif agar UMKM Sentra Boneka Sukamulya bisa bersaing menghadapi persaingan MEA adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung kurangnya komunikasi atara dinas dan UMKM Sentra Boneka Sukamulya sehingga tidak adanya koordinasi yang baik untuk menyetarakan harga sehingga terjadi persainga yang tidak sehat antara sesama UMKM Sentra Boneka Sukamulya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2015) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh suku Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat (Studi Kasus Pada Produsen Tempe Dan Tahu Di Semanan Kalideres). Penelitiannya menggunakan teori pemberdayaan Suharto dengan metode penelitian kualitatif dan penentuan informan *Purposive Sampling*.

Permasalahan UMKM Produsen Tempe Dan Tahu Di Semanan Kalideres yang ia pada penelitiannya adalah simpan pinjam dana yang di himpun koprasi yang sudah tidak berjalan selama tahun 2014, selain itu terbatasnya pasar dan jaringan usaha yang menyebabkan Produsen Tempe Dan Tahu mencari pasar sendiri dan terbatasnya modal Produsen Tempe Dan Tahu yang membuat usaha sulit berkembang.

Persamaan dan perbedaan antara peneliti diatas dengan peneliti ini adalah peneliti di atas sama-sama meneliti peran pemerintah Dinas Perdagangan dan

Perindustrian dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah menghadapi pasar nasional maupun *global* Perbedaan adalah Peneliti ini lebih berfokus pada program SNI yang di lakukan pemerintah untuk menjadi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN sedangkan peneliti diatas lebih fokus pada himpun koprasi yang sudah tidak berjalan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Hidayadi (2014) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia dengan judul Pemberdayaan pelaku industri kreatif bidang desain grafis di Kota Bandung. Penelitiannya menggunakan teori pemberdayaan suharto dengan metode penelitian kualitatif dan penentuan informan *Purposive Sampling*.

Permasalahan industri kreatif bidang desain khususnya desain grafis adalah dimana saat ini masyarakat masih memandang bahwa desain kemasan dalam suatu produk yang ia jual belum terlalu penting padahal desain kemasan yang menarik . Contohnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah, ia masih belum terfokus pada bagaimana bentuk kemasan, mereka masih terfokus pada hasil yang ia jual.

Persamaan dan perbedaan antara peneliti diatas dengan peneliti ini adalah kesuliatan untuk mengembangkan market pasar mereka dalam suatu produk yang akan di jual dan diterima oleh pasar selain itu sama-sama menggunakan teori suharto, Perbedaan adalah Peneliti ini lebih berfokus pada program SNI yang di terapkan didalam suatu produk sedangkan peneliti diatas lebih fokus pada hasil yang di jual belum terfokus pada bagaimana bentuk kemasan ataupun standarisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, didapatkan sebuah data bahwa masalah pokok yang kini dihadapi para pelaku UMKM Sentra Boneka

Sukamulya di Kota Bandung yaitu permasalahan Permasalahn Program SNI untuk menghadapi persaingan MEA yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Bidang Sumber Daya dan Promosi Industriyang di terapkan pada tahun 2015 sampai 2016 masalah yang pertama adalah Pemberdayaan Program SNI belum optimal untuk memungkinkan potensi UMKM Sentra Boneka Sukamulya menciptakan suasana lingkungan usaha yang nyaman, kondusif dan strategis sehingga mampu menghadapi MEA karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum mendukung dan membiarkan UMKM Sentra Boneka Sukamulya semakin terpuruknya dari tahun 2012 yang awalnya terdapat 12 pengusaha dan di tahun 2017 hanya terdapat 4 pengusaha.

Pemberdayaan Program SNI oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sudah memperkuat pengetahuan dan kemampuan UMKM Sentra Boneka Sukamulya tentang Program SNI agar mampu menghadapi persaingan MEA melalui sosialisai pada tahun 2015 tetapi masi terkendala partisipasi UMKM Sentra Boneka Sukamulya yang hanya satu sentra yang mengikuti Program SNI.

Pemberdayaan Program SNI belum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tidak memiliki regulasi melindungi keberadaan UMKM Sentra Boneka Sukamulya untuk melindungi produk yang sudah dihasilkan agar mampu menghadapi persaingan MEA karena harus mengikuti Program SNI tersebut dan masi terkendala oleh mahalnya persyaratan harus mempunyai SIUP dan membayar lima juta rupiah hanya berlaku 6 bulan setelah itu harus di perpanjang lagi maka memberatkan UMKM Sentra Boneka Sukamulya.

Pemberdayaan Program SNI oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk memberikan bimbingan dan dukungan UMKM Sentra Boneka Sukamulya sehingga berkembang dan produk bisa bersaing menghadapi persaingan MEA adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tidak ada bantuan alat dan regulasi modal berupa bantuan kepada UMKM Sentra Boneka Sukamulya untuk mengikuti Program SNI.

Pemberdayaan Program SNI oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk memelihara kondisi yang kondusif agar UMKM Sentra Boneka Sukamulya bisa bersaing menghadapi persaingan MEA adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung kurangnya komunikasi atara dinas dan UMKM Sentra Boneka Sukamulya sehingga tidak adanya koordinasi yang baik untuk menyetarakan harga sehingga terjadi persainga yang tidak sehat antara sesama UMKM Sentra Boneka Sukamulya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka bagaimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung melakukan fungsi Pemberdayaan Program SNI terhadap UMKM Sentra Boneka Sukamulya di Kota Bandung. Sejauh mana sebuah pemberdayaan program SNI yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung terhadap pelaku UMKM Sentra Boneka Sukamulya sehingga menjadi berdaya memunculkan produk yang bersetandar SNI serta unggul untuk menghadapi MEA. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh, dalam penyusunan penelitian yang berjudul :

"Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Sentra Boneka Dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Di Kota Bandung"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah yaitu Bagaimana Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Sentra Boneka Dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) di Kota Bandung melalaui pendekatan Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, Pemeliharaan:

1. Bagaimana mengetahui dan menganalisis pemberdayaan Program SNI untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya melalui pendekatan pemungkinan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Menghadapi Persaingan MEA Di Kota Bandung ?
2. Bagaimana mengetahui dan menganalisis pemberdayaan Program SNI untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya melalui pendekatan penguatan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Menghadapi MEA di Kota Bandung ?
3. Bagaimana mengetahui dan menganalisis pemberdayaan Program SNI untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya melalui pendekatan perlindungan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Menghadapi Persaingan MEA Di Kota Bandung ?

4. Bagaimana mengetahui dan menganalisis pemberdayaan Program SNI untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya melalui pendekatan penyokongan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Menghadapi Persaingan MEA di Kota Bandung ?
5. Bagaimana mengetahui dan menganalisis pemberdayaan Program SNI untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya melalui pendekatan pemeliharaan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Menghadapi Persaingan MEA di Kota Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Sentra Boneka Sukamulya Dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) Di Kota Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan Program SNI untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya melalui pendekatan pemungkinan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Menghadapi Persaingan MEA Di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan Program SNI untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya melalui pendekatan penguatan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Menghadapi MEA di Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan Program SNI untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya melalui pendekatan perlindungan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Menghadapi Persaingan MEA Di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan Program SNI untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya melalui pendekatan penyokongan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Menghadapi Persaingan MEA di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan Program SNI untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya melalui pendekatan pemeliharaan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Menghadapi Persaingan MEA di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ditinjau dari sudut pendekatan keilmuan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
   a. Semoga penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program SNI untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya di Kota Bandung dalam menghadapi persaingan MEA dan bahan perbandingan bagi penelitian sejenis bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Semoga penelitian ini bisa menambah ilmu dan pengalaman, serta semangat belajar peneliti dalam melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan Pemberdayaan Program SNI dan bisa menjadi sumber jurnal dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

   b. Bagi Lembaga

      Semoga penelitan ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Bandung sebagai bahan masukan untuk membuat sebuah terobosan baru dan tetap menjaga konsistensinya dalam Pemberdayaan Program SNI untuk pelaku UMKM Sentra Boneka Sukamulya.

   c. Bagi Masyarakat

      Bagi pelaku UMKM Sentra Boneka Sukamulya semoga dapat dapat bermanfaat terutama sebagai bahan informasi bagi masyarakat serta dapat memberikan pemahaman mengenai apa saja kebijakan Program SNI yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan daya saing maupun produktifitas para pelaku UMKM Sentra Boneka Sukamulya Menghadapi Persaingan MEA di Kota Bandung.